

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah dan semakin sadarnya masyarakat akan ajaran Islam, banyak bermunculan lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) yang berbasis pada prinsip syariah. Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah akhir-akhir ini merupakan suatu kejadian yang nyata dan menarik untuk dicermati.

BMT Amanah Ummah Merupakan salah satu BMT yang boleh dikatakan maju dalam menghimpun dan meyalurkan dana masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Disamping itu BMT Amanah Ummah memiliki banyak produk di antaranya adalah produk lembaga pembiayaan seperti perbankan syariah. Tetapi dalam kenyataannya BMT Amanah Ummah sering mendapatkan nasabah atau anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya dan dalam operasional pembiayaannya hampir sama dengan perbankan syariah.

Dewasa ini seluruh BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT dapat berkembang dari kelompok swadaya masyarakat¹. Dengan berbentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil. Dalam sektor keuangan operasional BMT hampir sama dengan perbankan syariah. Sejalan dengan hal tersebut dan perkembangan praktis bisnis syariah, maka diperlukan suatu perangkat atau alat yang dapat memperlancar proses dan transaksi bisnis tersebut. Perangkat inilah yang kemudian disebut akuntansi. Arti penting akuntansi pada lembaga keuangan adalah sebagai salah satu alat yang diperlukan sekali oleh sebuah lembaga keuangan untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak yang terkait. Laporan keuangan sebagai sumber informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakainya, terutama bagi pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu keputusan.

Laporan keuangan digunakan oleh berbagai pengguna dengan masing-masing kepentingannya. Pengguna laporan keuangan dalam sistem perbankan syariah meliputi investor, pembayar zakat, infaq dan shodaqoh serta Dewan Keuangan Syariah². Dan pengguna laporan keuangan BMT adalah pemerintah, akuntan publik dan masyarakat³. Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaannya. Akuntan publik sebagai lembaga

¹ A Djayuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 187.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 285.

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 244.

profesional di bidang audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan daya guna BMT. Yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan BMT sesungguhnya adalah masyarakat atau nasabah itu sendiri. Laporan keuangan tersebut menjadi sangat strategis, dalam meningkatkan kepercayaan para calon anggotanya begitu juga penyajian laporan keuangan BMT Amanah Ummah.

Akuntansi keuangan harus mengikuti seperangkat standar dan prosedur umum yang dinamai *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Di Indonesia, GAAP yang berupa pernyataan-pernyataan tersebut dikodifikasikan dalam standar akuntansi keuangan⁴. Standar tersebut berisikan kumpulan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap perusahaan lembaga keuangan non bank seperti BMT Amanah Ummah. Sedangkan berdasarkan pernyataan akuntansi keuangan koperasi mengikuti PSAK No. 27 sedangkan penyajian akuntansi perbankan syariah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 59.

BMT Amanah Ummah merupakan salah satu dari sekian banyak BMT yang ada. Seperti disebutkan di atas, bahwa BMT saat ini diarahkan untuk berbadan hukum koperasi, BMT Amanah Ummah juga berbadan hukum koperasi dan laporan keuangannya mengacu pada PSAK No. 27. Namun

⁴ Slamet Sugiri dan Bogat Agus Riyono, *Akuntansi Pengantar 1* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001), hlm. 9.

karena dalam operasionalnya memakai pencatatan dan pelaporan tambahan bisnis keuangan syariah, maka dalam praktek keuangannya banyak mengacu pada PSAK No. 59 terutama pada produk pembiayaan. Terkait hal itu, ada pertanyaan yang tumbuh apakah BMT Amanah Ummah menerapkan laporan keuangan tersebut, sesuai dengan PSAK No. 59, sementara BMT Amanah Ummah berbadan hukum koperasi yang berdasarkan PSAK No. 27.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul Analisis Laporan Keuangan BMT Amanah Ummah studi atas kesesuaian PSAK No. 59.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan kajian ini, maka penulis mengemukakan pokok masalah sebagai berikut: Apakah penyajian laporan keuangan BMT Amanah Ummah sesuai dengan PSAK No.59 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan BMT Amanah Ummah dengan PSAK No. 59.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tentang analisis penyajian laporan keuangan BMT Amanah Ummah adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang aplikasi penyajian laporan keuangan BMT. Selain itu, penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah.

b. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat luas sekaligus menumbuhkan kesadaran bagi orang yang belum menggunakan lembaga keuangan BMT.